



PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun Kode Pos 63127

Telp. (0351) 4472235, 4472377 Fax. (0351) 499041

Email : dinasperhubungankotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN

NOMOR : 042.401.112/ 18 / 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBANTU DI LINGKUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun tentang Pejabag Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Madiun ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
- 10.Keputusan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- 11.Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- 1) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- 2) Membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- 3) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- 4) Membuat, mengumpulkan , serta memlihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya ;
- 5) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik ;
- 6) Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi ;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kota Madiun ;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 25 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MADIUN**

ANSAR RASIDI, S,Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199201 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
 NOMOR : 024.401.112/ 18 /2019
 TANGGAL : 25 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Atasan PPID Pembantu	ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si	Kepala Dishub Kota Madiun
2	PPID Pembantu	IMAN SU'ADIDI, SH	Kepala Bidang Angkutan Darat
3	Sekretaris	NARNIATI, S.IP	Kasubbag Umum & Keuangan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	SUWITO	Staf Sub Bagian Umum
5	Bidang Pengelolaan data dan Klarifikasi Informasi	WUWUK RETNOWATI	Staf Sub Bagian Umum
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. EKO SETIJAWAN, ST	Kepala Seksi Angkutan Orang
		2. SUPRAPTO, SH	Kepala UPTD Terminal Penumpang & Perpakiran
		3. AGUNG WITJAKSONO, S.Sos	Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Lalu Lintas
		4. SUGITO, SH	Kepala Seksi Sarana & Prasarana Lalu Lintas
		5. SUPATMONO, SH	Kepala Seksi Angkutan Barang
		6. Dra. DWI ENDAH RINAWATI, M.Si	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Ditetapkan di **MADIUN**
 pada tanggal 25 Januari 2019
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA MADIUN**

ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199201 1 001

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
-----------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------

1	Proses evaluasi andalalin	PP No. 32/2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas	dishub	Selama proses evaluasi	M (r
2	Hasil evaluasi kajian andalalin	Dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas	dishub	Apabila ada persetujuan pemrakarsa	M (r
3	Nama, alamat wajib uji	Perda no.23 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum	dishub	Sesuai masa berlaku masa uji kendaraan	M b
4	Data identitas pemilik kendaraan bermotor (KB)	Ps 28f UUD45, Ps 28g UUD45, UU no39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	dishub	Selama KTB masih beroperasi	F
5	Identitas tersangka pelanggaran lalu lintas angkutan jasa	KUHAP	dishub	Sampai ada vonis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap	D
6	SPJ, SPM, SPP, SP2D, RKA,RKPA, DPA, DPPA	UU no.8/1974 ttg Keuangan Negara UU No. 1 th 2004 ttg Pembendaraan Negara	dishub	Masa Pelaksanaan pekerjaan	M k
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ➤ Dokumen Kontrak Jaminan ➤ Pemeliharaan Kegiatan 	Pepres No. 54 Tahun 2010 ttg pengadaan barang dan jasa pasal 66. Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang dan Jasa pasal 66	dishub	➤ Selama proses pengadaan barang dan jasa ➤ Selamanya ➤ Selama Pemeliharaan	M p
8	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Kemendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	dishub	Sampai audit selesai	I k

oleh :

DINAS PERHUBUNGAN

MADIUN

RASIDI, S,Sos, M.Si

Utama Muda

19720510 199201 1 001

Disahkan

KEPALA

KOTA

ANSAR

Pembina

NIP.